PROBLEMATIKA DAN PENANGANAN KENDALA ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAYANI PASIEN PESERTA BPJS BERDASARKAN PASAL 29 AYAT 1 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

TESIS

Oleh:

SILIANI JOSEF SUBANDI

201920251004



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA JAKARTA
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis

: Problematika dan Penanganan Kendala Atas Pelaksanaan

Kewajiban Rumah Sakit Untuk Melayani Pasien Khususnya

Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Nama Mahasiswa

: Siliani Josef Subandi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201920251004

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Program Konsentrasi

: Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis

: 2 Juli 2021

Bekasi, 20 Juli 2021 MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIDN 0319046403

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH.

Problematika dan Penanganan.., Siliani Josef Subandi, Fakultas Hukum, 2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PROBLEMATIKA DAN PENANGANAN

KENDALA ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAYANI PASIEN PESERTA BPJS BERDASARKAN PASAL 29 AYAT 1 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Nama Mahasiswa

SILIANI JOSEF SUBANDI

Nomor Pokok Mahasiswa

201920251004

Program Studi/Fakultas

Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi Tanggal Lulus Ujian Tesis Hukum Pidana 2 Juli 2021

Bekasi, 20 Juli 2021 MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA

NIDN 0304065402

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H. ...

NIDN 0319046403

Penguji II : Sabela, S.H., Ph.D.

NIDN 0307078203

MENGETAHUI

Ketua Program

Dekan

Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H. M.M.

NIDN 0127117401

NIDN 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: SILIANI JOSEF SUBANDI

NPM

: 201920251004

Tt1

: Probolinggo, 18 September 1958

Prodi

: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul "Problematika dan Penanganan Kendala Atas Pelaksanaan Kewajiban Rumah Sakit Untuk Melayani Pasien Khususnya Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 2 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,

395AJX336064428

SILIANI JOSEF SUBANDI

ABTRAK

Siliani Josef Subandi, 201920251004, Problematika dan Penanganan Kendala Atas Pelaksanaan Kewajiban Rumah Sakit Untuk Melayani Pasien Khususnya Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, total 139 halaman, 2021.

Kesehatan sebagai salah satu hak yang diatur dalam Konstitusi merupakan hak dari seluruh masyarakat, dimana ketentuan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah suatu program kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat atau warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun dalam pelaksanaan program kesehatan tersebut, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, yaitu terjadinya penolakan terhadap masyarakat peserta BPJS tersebut oleh beberapa rumah sakit, yang salah satunya pernah terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang dialami oleh Reny Wahyuni dan Hotmaida Hutapea, yang merupakan masyarakat kurang mampu sedangkan pasien yang kurang mampu sejatinya dilindungi hak nya dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua permasalahan yang hendak dibahas, yaitu mengenai bagaimana bentuk kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit terhadap hak-hak pasien peserta BPJS yang mengajukan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dan mengenai bentuk penanganan problematika terhadap Pasien peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi agar tidak terjadi penolakan terhadap pasien peserta BPJS.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kemudian diperoleh dua kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Bentuk kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit terhadap hak-hak pasien peserta BPJS yang mengajukan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, adalah adanyakewajiban melayani pasien, baik pasien yang tidak mampu merupakan peserta BPJS, maupun yang bukan peserta BPJS, baik pasien yang membutuhkan pertolongan darurat maupun yang membutuhkan tindakan medis lainnya, termasuk dalam hal ini memberikan rujukan, selain itu tanggung jawab hukum rumah sakit, apabila melakukan penolakan terhadap pasien BPJS, maka terhadap rumah sakit maupun pegawai pada rumah sakit tersebut, seperti staf dan tenaga kesehatan, serta direksi dari rumah sakit tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam bentuk dikenakan sanksi, dan penanganan problematika terhadap Pasien peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi agar tidak terjadi penolakan terhadap pasien peserta BPJS, adalah pemerintah perlu meningkatkan peran serta Badan Pengawas Rumah Sakit untuk

menanggulangi problematika terhadap Pasien peserta BPJS yang mengalami penolakan dari rumah sakit.

Kata Kunci: Hukum Rumah Sakit, Pasien BPJS, Perlindungan Hukum

Pembimbing: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH.



ABSTRACT

Siliani Josef Subandi, 201920251004, Problems and Obstacles Management Over the Implementation of Hospital Obligations to Serve Patients, Especially Social Security Administering Bodies (BPJS) Patients Based on Article 29 Paragraph 1 Letter E Law Number 44 Year 2009 Regarding Hospitals, total 139 pages, 2021.

Health as one of the rights stipulated in the Constitution is the right of all people, where the provisions of Article 28 H paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Social Security Administering Body (BPJS) is a government health program that aims to provide public welfare. or Indonesian citizens based on Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies, however in the implementation of the health program, there are several problems in its implementation, namely the rejection of the BPJS participant community by several hospitals, one of which has occurred in The Bekasi City Regional General Hospital experienced by Reny Wahyuni and Hotmaida Hutapea, who are underprivileged people while patients who are less fortunate are actually protected by their rights under the provisions of Article 32 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Based on this description, there are two problems that will be discussed, namely regarding the forms of the obligations and responsibilities of the hospital to the rights of BPJS participant patients who apply for health services at the Bekasi City Regional General Hospital and regarding the form of problematic handling of BPJS participant patients at the Hospital. Regional General of Bekasi City so that there is no rejection of BPJS participant patients.

The research method used in this research is normative juridical research method. The materials studied were primary, secondary and tertiary legal materials.

Then two conclusions were obtained in this study, namely the form of obligations and responsibilities of the hospital towards the rights of BPJS participant patients who apply for health services at the Bekasi City Regional General Hospital, namely that there is an obligation to serve patients, both incapacitated patients are BPJS participants, and those who are not a BPJS participant, both patients who need emergency help or those who need other medical measures, including in this case providing referrals, apart from that the hospital's legal responsibility, if they refuse BPJS patients, then the hospital and staff at the hospital, such as staff and health workers, as well as directors of the hospital can be held accountable for the law in the form of being subject to sanctions, and handling problems for BPJS participant patients at the Bekasi City Regional General Hospital so that there is no rejection of BPJS participant patients, is that the government needs to increase p eran and the Hospital

Supervisory Agency to overcome problems with BPJS participant patients who experience rejection from the hospital.

Keywords: Hospital Laws, BPJS Patients, Legal Protection

Supervisor: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH.



ABTRAKSI

Siliani Josef Subandi, 201920251004, Problematika dan Penanganan Kendala Atas Pelaksanaan Kewajiban Rumah Sakit Untuk Melayani Pasien Khususnya Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, total 139 halaman, 2021.

Kesehatan sebagai salah satu hak yang diatur dalam Konstitusi merupakan hak dari seluruh masyarakat, dimana ketentuan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah suatu program kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat atau warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun dalam pelaksanaan program kesehatan tersebut, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, yaitu terjadinya penolakan terhadap masyarakat peserta BPJS tersebut oleh beberapa rumah sakit, yang salah satunya pernah terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang dialami oleh Reny Wahyuni dan Hotmaida Hutapea, yang merupakan masyarakat kurang mampu sedangkan pasien yang kurang mampu sejatinya dilindungi hak nya dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua permasalahan yang hendak dibahas, yaitu mengenai bagaimana bentuk kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit terhadap hak-hak pasien peserta BPJS yang mengajukan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dan mengenai bentuk penanganan problematika terhadap Pasien peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi agar tidak terjadi penolakan terhadap pasien peserta BPJS.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kemudian diperoleh dua kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Bentuk kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit terhadap hak-hak pasien peserta BPJS yang mengajukan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, adalah adanyakewajiban melayani pasien, baik pasien yang tidak mampu merupakan peserta BPJS, maupun yang bukan peserta BPJS, baik pasien yang membutuhkan pertolongan darurat maupun yang membutuhkan tindakan medis lainnya, termasuk dalam hal ini memberikan rujukan, selain itu tanggung jawab hukum rumah sakit, apabila melakukan penolakan terhadap pasien BPJS, maka terhadap rumah sakit maupun pegawai pada rumah sakit tersebut, seperti staf dan tenaga kesehatan, serta direksi dari rumah sakit tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam bentuk dikenakan sanksi, dan penanganan problematika terhadap Pasien peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi agar tidak terjadi penolakan terhadap pasien peserta BPJS, adalah pemerintah perlu meningkatkan peran serta Badan Pengawas Rumah Sakit untuk

Chenso Sulijaya Suyono (Alm), PPDS Bedah Umum UNPAD; Michelthelia Sulijaya Suyono, S.Ked) yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam penulisan Tesis ini.

8. Kepada Teman-Teman kelas, Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruksi serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekaşi, 2 Juli 2021

Silian Josef Subandi

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	V
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi dan <mark>Perumusan Masalah</mark>	7
1.2.1.Identifikasi Masalah	7
1.2. <mark>2.Perumusan Masalah</mark>	
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3. <mark>1.Tujuan Penelitian</mark>	
1.3.2.Manfaat Penelitian	8
1.4.Kerang <mark>ka Teor</mark> itis, Konseps <mark>ional</mark> , dan <mark>Pemiki</mark> ran	
1.4.1.Kerangka Teoritis	9
1.4.2.Kerangka Konsepsional	
1.4.3.Kerangka Pemikiran	
1.5 Metode Penelitian	25
1.5.1.Tipe dan Pendekatan Penelitian	25
1.5.2.Sumber Data dan Jenis Data	26
1.5.3.Teknik Pengumpulan Data	27
1.5.4.Populasi dan Sampel	27
1.5.5.Teknik Pengolahan dan Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN BPJS PADA RUMAH	
SAKIT	29
2.1.Teori Negara Kesejahteraan	29
2.2 Teori Perlindungan Hukum	32

2.3.Hukum Kesehatan	35
2.4.Tinjauan Umum tentang BPJS	39
2.4.1.Pengertian dan Pengaturan BPJS	39
2.4.2.Tugas, Fungsi dan Wewenang BPJS Kesehatan	41
2.4.3.Hak dan Kewajiban Pasien BPJS	42
2.4.4.Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh BPJS	47
2.5.Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit	48
2.5.1.Pengertian dan Pengaturan tentang Rumah Sakit	48
2.5.2.Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	50
2.5.3.Etika di Rumah Sakit	51
2.6.Hak dan Kewajiban Pasien	55
BAB III HASIL PENELITIAN	61
3.1.Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi	61
3.2.Fakta Penolaka <mark>n BPJS pada Rumah</mark> Sakit Umum Kota Daerah Bekasi	77
3.3.Fakta Penolakan BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Lainnya Di Indonesia	80
BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP	
HAK-HAK PASIEN PESERTA BPJS YANG MENGAJUKAN PELAYANAN	
KESEHA <mark>TAN P</mark> ADA RUMAH SAKIT <mark>UMUM</mark> DAERAH KOTA BEKASI	86
4.1. Bentuk Kewajiban Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Hak-Hak Pasien Peserta BPJS Yang Mengajukan Pelayanan Kesehatan Pada	
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi	86
4.2. Bentuk Penanganan Problematika Terhadap Pasien Peserta BPJS Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Agar Tidak Terjadi	
Penolakan Terhadap Pasien Peserta BPJS	110
BAB V PENUTUP	127
5.1Simpulan	127
5.2.Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
RIWAYAT HIDUP	135